

Praktik Akumulasi *Lebenswelt* Sebagai Basis Strategi BUM Desa yang Berkelanjutan

Ahmad Imron Rozuli¹

¹ Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya.

Abstract. in line with the emergence of constitutional frameworks that are designed to improving village development, there has been a significant increase in the presence of village economic institutions such as BUM Desa in Indonesia. Yet, this institutional emergence quantitatively is not always followed by the increasing of quality and professional management of economic resource for the welfare of local communities. Specific factor such as weak empowerment, corrupt behavior of local elites and low capacity of resource management are still challenges faced in order to strengthen the capacity of village economic institutions and in order to create a sustainable BUM Desa. Based on local development experience at Gondowangi Village, in Wagir District, Malang Regency, this study intend to explain what sociological scholarship called as a *lebenswelt* (community knowledge) which serves as a main basis for village development planning and sustainable BUM Desa maintenance strategies. This research uses a qualitative descriptive method combined with the perspective of communicative action theory which promoted by Jurgen Habermas. This research argue that there is three important factors influence the success of the practice of accumulating community knowledge in village development planning, namely, first: the leadership factor, secondly: mapping problems and potentials based on community participation, and third: the involvement of external group that can encourage innovation in the local communities.

Keywords: Village; Development; BUM Desa; *Lebenswelt*; Sustainable

Abstrak. Sejalan dengan lahirnya beberapa kerangka konstitusional yang berorientasi pada peningkatan pembangunan desa, telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kehadiran kelembagaan ekonomi desa seperti BUM Desa di Indonesia. Akan tetapi, peningkatan kelembagaan secara kuantitatif tersebut ternyata tidak selalu diikuti oleh kehadiran pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkualitas dan profesional bagi kesejahteraan masyarakat desa. Lemahnya pemberdayaan, perilaku koruptif elit desa, dan rendahnya kapabilitas sumber daya pengelola kerap menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi desa dan menghadirkan BUM Desa yang berkelanjutan. Dengan merujuk pada pengalaman pembangunan Desa Gondowangi, di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, penelitian ini bermaksud menjelaskan mengenai penggunaan *lebenswelt* atau basis pengetahuan masyarakat yang berfungsi sebagai basis utama perencanaan dalam upaya pembangunan desa dan strategi pemeliharaan BUM Desa yang berkelanjutan. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan perspektif teori tindakan komunikatif yang diperkenalkan Habermas. Sebagai hasilnya, penelitian ini menemukan tiga faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan praktik akumulasi pengetahuan warga dalam perencanaan pembangunan desa, yakni pertama, faktor kepemimpinan, kedua pemetaan masalah dan potensi yang berbasis partisipasi masyarakat, dan yang ketiga, pelibatan kelompok eksternal yang dapat membantu mendorong lahirnya inovasi di masyarakat

Kata Kunci: Desa; Pembangunan; BUM Desa; *Lebenswelt*; Berkelanjutan

Received: 15/07/2021

Revised: 09/08/2021

Accepted: 30/08/2021

Korespondensi:

Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Gedung A Lt.3
Jl.Veteran, Malang Jawa Timur
Email: imron@ub.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa adalah melalui penguatan kapasitas kelembagaan ekonominya. Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 telah memberikan amanat konstitusional dalam hal keleluasan bagi desa untuk mengelola pembangunan di tingkat desa secara partisipatif. Hal ini bisa diaktualisasikan dalam dua perspektif, yaitu melestarikan nilai-nilai masyarakat adat yang diimbangi dengan tata kelola pemerintahan desa administratif yang demokratis, serta pemberian hak-hak adat dalam mengelolah potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Berdasarkan hal itu, pada tahun 2015 lalu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kehadiran BUM Desa diharapkan untuk bisa menampung seluruh kegiatan ekonomi yang berada di desa. Harapannya, terjadi peningkatan perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi-potensi di sektor barang dan jasa yang ada di desa bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pada tahun 2021 ini pemerintah secara khusus juga telah mengeluarkan kerangka konstitusional yang lebih kuat melalui kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tentang BUM Desa. Kehadiran PP ini sendiri adalah dalam rangka memperkuat kapasitas dan memperluas kewenangan kerja dari BUM Desa, dengan salah satu contoh, menjadikannya sebagai entitas berbadan hukum yang memungkinkan mereka menjalin kerja sama dengan badan hukum lainnya hingga melakukan peminjaman ke perbankan. Aturan tersebut juga telah menjamin bila BUM Desa sebagai badan hukum tidak lagi dapat dibubarkan namun hanya dihentikan usaha. Demikian dengan itu dapat dipahami seiring dengan semakin meningkatnya kewenangan yang dimiliki oleh BUM Desa maka pembahasan mengenai perkembangannya pun juga dirasa semakin penting.

Secara umum Indonesia saat ini memiliki jumlah desa sebesar 83.820 yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Sementara terkait keberadaan BUM Desa di Indonesia tercatat mengalami lonjakan yang cukup signifikan dimana pada tahun

2019 lalu tercatat berjumlah 50.1999 unit. Kondisi ini menunjukkan bila baru sekitar 59% desa yang telah mendirikan BUM Desa dari total keseluruhan jumlah desa yang ada. Meskipun belum semua desa yang telah berhasil mendirikan BUM Desa, jumlah tersebut telah mencerminkan adanya peningkatan terutama secara kuantitatif pada beberapa tahun terakhir bila dibandingkan dengan jumlah BUM Desa pada tahun 2014 lalu yang hanya berjumlah 1.022 dari seluruh Indonesia. Sebagai upaya penataan kelembagaan ekonomi desa pendirian BUM Desa merupakan suatu langkah yang penting, mengingat penataan kelembagaan ekonomi melalui pengembangan unit-unit usaha sama halnya dengan mendorong percepatan akselerasi aktifitas ekonomi dalam bingkai *profit*.

Namun demikian, kendati secara kuantitatif BUM Desa mengalami peningkatan masih terdapat persoalan kerap dihadapi terutama dalam hal peningkatan kapasitas ekonomi. Sejumlah persoalan masih membayangi baik dalam upaya menghadirkan BUM Desa secara institusi maupun dari segi pengelolaan BUM Desa secara profesional. Beberapa misalnya terkait aspek kepedulian maupun pola pikir warga desa yang dianggap menjadi faktor penghambat upaya pembangunan desa seperti kehadiran BUM Desa (Pradani, 2020; 15). Selain itu tantangan juga muncul pada aspek yang lebih bernuansa struktural, temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada 2019 lalu mengonfirmasi bila adanya potensi penyelewengan anggaran untuk kegiatan BUM Desa dimana sebanyak 1.670 dari 2.188 BUM Desa yang tidak berjalan tetapi tetap mendapat kucuran anggaran dari APBDesa (tempo.co, 2019). Hal ini sejalan dengan fakta bahwa sepanjang 2015-2019 terdapat setidaknya 1.371 laporan pengaduan kasus dana desa dengan putusan pengadilan sebanyak 252 kasus dan melibatkan 214 tersangka dari unsur kepala desa.

Beberapa persoalan tersebut selain menjadi tantangan yang terus dihadapi dalam konteks upaya menghadirkan BUM Desa, disisi lain juga menggambarkan tentang masih rendahnya kesadaran akan pengelolaan aset, dan lemahnya pengontrolan oleh pihak terkait dalam mengunggulkan pola-pola pemberdayaan masyarakat berbasis lokal. Sehingga yang terjadi adalah kehadiran kelembagaan ekonomi cenderung menjadi instrumen yang mendukung kekuasaan di ranah desa, alih-alih berjalan ideal dengan keterlibatan penuh masyarakat lokal. Sejumlah aset

yang seharusnya dapat dikelola dan menjadi peluang usaha masyarakat justru menjadi sebatas aset pribadi untuk kepentingan oknum tertentu.

Adapun artikel ini bermaksud menjelaskan mengenai pola pengelolaan BUM Desa, sebagaimana pengalaman yang dilakukan di Desa Gondowangi, Kabupaten Malang, yang cukup berhasil memanfaatkan aspek pengetahuan personal atau yang dikenal juga sebagai konsep lebenswelt sebagai basis perubahan sosial utamanya dan dengan itu pula mampu menciptakan strategi pemeliharaan BUM Desa secara berkelanjutan. Menggunakan perspektif konsep lebenswelt dan konsensus yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas, dimana dijelaskan bila lebenswelt memiliki fungsi sebagai suatu basis kognitif komunikasi. Hal itu ditafsirkan bahwa dalam suatu tindakan rasional komunikasi terdapat aspek pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki aktor yang membantu menciptakan dialog melalui komunikasi verbal (Hardiman, 1993, p. 38). Melalui itu, artikel ini menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan warga (lebenswelt) yang meliputi pengetahuan dalam bidang seni, pertanian, tari, agama, nilai-nilai leluhur, dan pengetahuan terkait tata kelola air dapat terakumulasi dalam satu perencanaan sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan BUM Desa.

Sejumlah studi berkaitan dengan BUM Desa sebelumnya sudah cukup banyak dilakukan oleh beberapa akademisi. Beberapa yang terbaru misalnya, artikel yang dilakukan oleh Nurul Aeni, dimana selain mendeskripsikan gambaran secara umum BUM Desa yang terdapat di Kabupaten Pati juga melakukan identifikasi sejumlah permasalahan yang kerap melingkupi kinerja dari BUM Desa (Aeni, 2020). Studinya berhasil menemukan bila terdapat hambatan dalam upaya pengembangan BUM Desa, dimana umumnya isu yang dihadapi adalah seputar persoalan keterbatasan modal atau aset, dan administrasi maupun pelaporan yang tidak cukup tertib.

Lebih lanjut mereka juga menunjukkan bila banyak dari keberadaan BUM Desa ternyata belum memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa. justru sebaliknya masih banyak BUM Desa yang dirundung dengan persoalan kelembagaan yang belum stabil, pengelolaan dan pengembangan usaha yang belum kuat, hingga legalitas BUM Desa yang belum kuat. Studi mereka sekaligus menyimpulkan bila beberapa persoalan tersebut sebenarnya berakar pada sejumlah latar belakang

diantaranya keterbatasan kapasitas pengelola BUM Desa, pengaruh politik desa, rendahnya dukungan dari pemerintahan desa hingga pemilihan usaha yang belum cukup berbasis potensi yang dimiliki desa.

Studi lain pada area kajian ini cukup didominasi oleh pengalaman sejumlah BUM Desa yang cukup berhasil karena dikelola secara profesional. Sebagaimana paparan Kinasi Dkk melalui pengalaman BUM Desa “Mekar Sari” yang selain berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Morosari, juga yang terpenting hal itu telah menjadikan desa Morosari sebagai desa yang mandiri sehingga tidak banyak bergantung pada Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) (Kinasih, 2020). Penelitian ini juga menjelaskan bila beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kehadiran BUM Desa tersebut adalah adanya inovasi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki desa. Selain itu, pengelolaan yang profesional juga memungkinkan BUM Desa melakukan pembentukan unit-unit usaha lain yang secara tidak langsung dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan daya produksi.

Beberapa permasalahan tentang BUM Desa juga dijelaskan melalui artikel yang dilakukan oleh Rony Jaya dan Mhd Rafi (2018). Studinya yang membahas mengenai BUM Desa Rempak Maju Jaya, Kampung Rempak, Kecamatan Sabakauh, Kabupaten Siak ini menemukan sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa. Hasil penelitiannya menemukan setidaknya terdapat lima hal yang menjadi faktor penghambat pengelolaan BUM Desa di wilayah tersebut, diantaranya adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang memiliki keterbatasan terhadap pengalaman bentuk-bentuk usaha yang berdampak pada stagnasi unit usaha BUM Desa (Jaya & Rafi, 2018). Selain itu, hambatan juga berasal dari faktor komunikasi yang tidak efektif dan keterbatasan beberapa arus informasi di seputar elit desa, kemudian adanya perbedaan penafsiran regulasi tentang BUM Desa dari para pengelola, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat secara umum hingga persoalan skala dan jangkauan usaha yang masih terbatas.

Selain banyak mengeksplorasi sejumlah faktor yang bersifat institusional maupun kultural dari pengembangan BUM Desa, studi dengan tema ini juga diisi oleh

sejumlah temuan yang lebih memberi penekanan pada basis politik dari pemerintahan desa. Sebagaimana artikel yang dilakukan yang secara khusus membahas mengenai sikap politik pemerintahan desa dalam mendukung pengembangan kewirausahaan desa (Djunandi, 2020). Studi yang mengambil pengalaman pada Desa Jatimukti, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tersebut kemudian menemukan bila sikap politik pemerintah desa menjadi aspek yang penting dalam menentukan keberhasilan perkembangan kewirausahaan desa termasuk di dalamnya pengelolaan kelembagaan ekonomi desa seperti BUM Desa. Kurangnya sikap politik pemerintah desa, hingga belum stabilnya struktur pemerintahan desa pada akhirnya membuat potensi kewirausahaan masyarakat belum dapat dikelola dengan baik.

Berdasarkan sejumlah studi tersebut, dapat diketahui bila belum terdapat artikel yang secara khusus mencoba melihat perkembangan pengelolaan kelembagaan ekonomi berupa BUM Desa yang menekankan pada aspek pengetahuan warganya (*lebenswelt*) sebagai basis utamanya. Sehingga studi ini memiliki kebaruan untuk menjelaskan peran penting dari bagaimana sebenarnya pemanfaatan pengetahuan warga menjadi bagian penting dan menentukan dalam proses perencanaan suatu BUM Desa. Studi ini menunjukkan bila melalui adanya praktik akumulasi lebenswelt yang diterapkan oleh aktor perubahan, yang dalam hal ini adalah sosok Kepala Desa, dapat berfungsi membantu terjadinya konsensus diantara warga desa dalam menciptakan strategi pemeliharaan BUM Desa secara berkelanjutan. Lebih lanjut studi ini juga sekaligus menjelaskan bila faktor lebenswelt atau pengetahuan warga dapat menjadi suatu basis sosial utama dari terjadinya suatu perubahan sosial (*social engineering*) yang dalam hal ini dapat diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan melalui BUM Desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Pemilihan metode kualitatif untuk memahami fenomena pengelolaan BUM Desa berbasis pengetahuan warga Lebenswelt ini didasarkan pada pemahaman bila salah satu fungsi dari metode

kualitatif itu sendiri adalah untuk meneliti fenomena secara mendalam dan digunakan untuk lebih memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui (Moleong, 2018).

Sumber data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dengan teknik observasi lapangan dan wawancara lapangan. Adapun penentuan informan dalam studi ini dilakukan secara *purposive*. Informan yang dipilih sebagai narasumber utama studi ini adalah individu-individu dan kelompok (agen) yang dianggap sebagai pelaku yang berperan penting dalam kegiatan BUM Desa di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Lebih detail, informan tersebut adalah meliputi Kepala Desa Gondowangi, Kepala Urusan Pemerintahan, Pengelola PAM-Desa, Pengelola Bank Sampah, Pengelola Balai Ekonomi Rakyat (BALERA), perwakilan dari Karang Taruna desa, Ketua Kelompok Tani, dan beberapa warga biasa desa setempat.

Selain menggunakan data primer, studi ini juga menggunakan data sekunder dimana data didasarkan pada sejumlah dokumen penting dari Kantor Desa Gondowangi yang berkaitan dengan laporan kegiatan tahunan, laporan kegiatan tri wulan, dan kegiatan yang telah masuk dalam Rencana Kerja Desa (RKPDes). Data-data tersebut membantu peneliti mendapatkan informasi terkait bagaimana sebenarnya kegiatan BUM Desa beriringan dengan dokumen tertulis RPJMDes jangka menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kepemimpinan di Desa Gondowangi

Desa Gondowangi merupakan desa yang berada di Kabupaten Malang, suatu desa yang dahulu cukup banyak memiliki permasalahan baik secara sosial maupun ekonomi di antara warganya. Pada dekade 90'an atau lebih tepatnya tahun 1999, desa ini kerap mengalami permasalahan sosial, yang diantaranya berupa konflik perebutan air oleh petani, permasalahan sampah, dan rendahnya tingkat kepercayaan warga desa terhadap pemerintah setempat.

Kondisi tersebut sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari beragam faktor, salah satunya adalah mengenai kepemimpinan pemerintah desa. Sebagaimana

diketahui aspek kepemimpinan yang dalam hal ini ditunjukkan oleh sosok kepala desa merupakan satu hal yang paling krusial. Bahkan semangat UU No.6 Tahun 2014 dapat ditafsirkan telah menempatkan kepala desa bukan lagi semata sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat atau daerah, namun langsung sebagai pemimpin masyarakat (Eko & Dkk, 2014, p. 158). Hal tersebut diartikan bila kehadiran kepala desa dituntut harus mengakar dekat dengan masyarakat yang sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani warga masyarakat. Pentingnya peran kepala desa itu dibuktikan melalui pengaruhnya yang cukup beragam, mulai dari peningkatan partisipasi masyarakat (Supriadi, 2020) pembangunan desa secara umum (Justar, 2020); (Alaslan, 2020) maupun berkaitan dengan aspek pendukung seperti para efektifitas kinerja dari para pendamping desa (Endrekson, 2021).

Terkait persolan kepemimpinan, utamanya dalam upaya pembangunan desa terdapat tiga model yang cukup populer. Pertama, model kepemimpinan regresif, model ini lebih menandakan pengaruh kepemimpinan yang problematis atau bahkan dapat dikatakan kepemimpinan yang justru memicu kemunduran atas upaya pembangunan yang justru diharapkan terjadi. Kedua, model kepemimpinan konservatif-inovatif, kepemimpinan ini lebih digambarkan sebagai kepemimpinan yang tidak banyak melakukan perubahan bagi desa kendati pemimpin juga tidak melakukan upaya yang kontraproduktif terhadap pembangunan. Model ini dapat dibayangkan bila pemimpin hanya melakukan fungsi pemerintahan yang bersifat formalitas tanpa melakukan perubahan yang berarti bagi masyarakat desa. Ketiga, adalah model kepemimpinan baru yang disebut sebagai tipe inovatif-progresif, dimana model kepemimpinan lebih menampilkan suatu kepemimpinan yang pro terhadap perubahan, mereka (para pemimpin) tidak saja memiliki gagasan yang mencerahkan terhadap pengelolaan desa tapi juga mampu mendorong kesadaran baru untuk perubahan masyarakat desa secara luas (Eko & Dkk, 2014, p. 159).

Secara historis, tepatnya pada tahun 1983 Desa Gondowangi sempat mengalami kondisi kepemimpinan yang menimbulkan suatu batas pemisah antara lembaga desa dengan anggota masyarakat. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh proses politik dalam ajang pemilihan kepala desa yang secara kuat dilandaskan pada aspek ketokohan atau kharismatik. Masih kuatnya budaya politik yang bersifat tradisional

kala itu menguatkan pola hubungan sosial yang bersifat struktural dan tokoh sentris sehingga sifat dari sebagian besar masyarakat cenderung menerima begitu saja apa yang menjadi ketentuan pemimpin di desa. Pada saat itu kohesi sosial yang terdapat di Desa Gondowangi sebenarnya menunjukkan kondisi yang ideal, dimana umumnya masih mempertahankan nilai-nilai gotong royong, kegotongroyongan, aktivitas *cangkruk'an* masih cukup dipelihara. Akan tetapi, modal berharga berupa kohesi sosial yang cukup mapan tersebut belum dimanfaatkan secara komunal dari pihak pemerintah desa atau dalam hal ini pemimpin. Justru sebaliknya, relasi masyarakat dengan pemerintah desa setempat cenderung bersifat vertikal sebab kuatnya nilai-nilai masyarakat desa tentang rasa hormat terhadap pemimpin (Sekdes, wawancara pribadi, 2020). Kondisi ini menampilkan hubungan sosial yang bersifat antara masyarakat yang tunduk dan cenderung pragmatis. Masyarakat selalu menerima apa yang menjadi keputusan pemimpin yang dengan hal itu, berdampak pada sikap partisipasi masyarakat yang rendah terhadap pembangunan desa.

Pola kepemimpinan desa Gondowangi yang demikian, berikut dengan kondisi masyarakatnya, terus bertahan hingga setidaknya dalam beberapa tahun dan periode kepemimpinan baru. Adanya Perubahan desain kelembagaan dalam pemilihan kepala desa, dimana sebelumnya Kepala Desa dipilih berdasarkan sistem penunjukan dan kemudian berubah menjadi pemilihan secara langsung oleh masyarakat yang dimulai sejak tahun 1983 ternyata tidak juga banyak mengubah kondisi pembangunan bagi masyarakat desa. Kepemimpinan desa kala itu tercatat masih diwarnai oleh banyak sengkabut pengelolaan yang cukup mengecewakan. Mulai dari persoalan program yang belum merepresentasikan kebutuhan masyarakat luas, pelaksanaan program yang tidak akuntabel dan transparan dan ruang partisipasi publik (musyawarah) yang masih terbatas oleh kalangan tertentu.

Sebagai puncaknya, pada periode kepemimpinan di tahun 2003, relasi pemimpin dengan masyarakat yang sebelumnya relatif stabil kendati tidak banyak perubahan yang berarti, sempat menjadi tegang. Terjadi demonstrasi oleh kelompok warga Gondowangi kepada kepala desa yang pada saat itu yang dianggap bermasalah dalam menangani sejumlah pengelolaan sumber daya desa. Beberapa misalnya, kepala desa tidak cukup cakap dalam memecahkan persoalan pengairan,

bahkan dianggap abai yang pada akhirnya memicu konflik antar petani lokal kala itu. Selain itu, adanya pungutan liar dengan wacana pembangunan balai desa maupun berkaitan dengan pajak bumi bangunan.

Titik balik bagi Desa Gondowangi terjadi setidaknya pada periode 2014-2019. Melalui ajang pemilihan kepala desa tahun 2013, terpilih sosok Danis Setya Budi sebagai kepala desa baru. Latar belakang pencalonan Danis sebagai kepala desa dapat disebut cukup unik karena ia maju dengan diusulkan langsung oleh warga desa. Dengan membawa visi utama “Mengembalikan Peran Pemerintahan Desa Pada Masyarakat dengan Memanfaatkan Aset Desa Gondowangi”, Danis juga menjanjikan sejumlah program kerja yang dianggap representatif terhadap kebutuhan yang diperlukan desa. Beberapa diantaranya adalah pembenahan tata kelola pengairan desa untuk para petani, pengembangan usaha warga melalui pemanfaatan sampah hingga pendirian lembaga ekonomi yang dapat bermanfaat bagi warga desa Gondowangi.

Kemenangan sosok Danis sebagai kepala desa pun menjadi harapan baru untuk perubahan yang ada di Desa. Setidaknya hal tersebut terlihat dari keterangan sejumlah warga bila kemenangannya menjadi sumber utama perubahan tata kelola desa, tata kelola aset yang dimiliki desa, dan manajemen solusi yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi warga selama ini. Singkatnya, kepemimpinan dari Kepala Desa yang baru tersebut telah mampu mengembalikan posisi desa di tengah masyarakat, dimana dengan itu masyarakat tidak lagi membatasi dirinya dengan pemerintah. pemimpin desa berhasil mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam segala kegiatan desa baik secara sosial, ekonomi maupun budaya (Tiyem, wawancara pribadi, 2020).

Hal ini tak terlepas dari langkah-langkah strategis yang diambil oleh sosok Danis sebagai kepala desa dimana ia mencoba menguatkan wacana tentang “Desa adalah warisan dari leluhur” kepada seluruh masyarakat desa Gondowangi. Wacana tersebut langsung disampaikan oleh kepala desa kepada setiap dusun dan warganya, ia langsung melebur ditengah masyarakat, terlibat dalam kegiatan cangkru’an, terlibat dalam kegiatan karang taruna, terlibat dalam tahlilan, pos jaga malam, dan kegiatan warga lainnya. Cara ini pun berhasil menggeser citra pemerintah desa, warga

tidak lagi merasa ada batasan dengan para pemangku pemerintah desa, dengan demikian partisipasi warga dalam kegiatan menjadi cukup tinggi. Komunikasi yang terbuka dengan para pejabat desa terutama pada pemimpinnya telah memungkinkan aspirasi dari masyarakat desa terserap dengan baik dan menjadi pertimbangan utama bagi kepala desa untuk membuat program. Dengan hal itu, terjalin sinergitas antara warga secara langsung dengan pemerintah untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Tabel 1. Susunan Kepala Desa Gondowangi

Nama Kepala Desa	Periode
Bpk. Tamsir	-
Bpk Tirto Rejo	-
Bpk. Karnah	-
Bpk Kasiam (Matsoleh)	-
Bpk Tasrip	-
Bpk. Salimo	1945-1980
Bpk. Subagio	1983-2000 (Proses pemilihan)
Bpk. Purwoto	2001-2005 (pengecualian)
Ibu. Sri Astutik	2007-2013
Bpk. Danis Setya Budi N.	2013-sekarang

Sumber: diolah, (<http://www.desagondowangi.com/kepala-desa>), 2021

Sejumlah uraian di atas telah menunjukkan bila terdapat dinamika kepemimpinan yang sebelumnya turut mempengaruhi upaya pembangunan Desa Gondowangi. Sebagaimana dijelaskan beberapa model kepemimpinan desa yang diperkenalkan oleh Sutoro Eko (2014), dapat disebut bila Desa Gondowangi mengalami beberapa model kepemimpinan. Pada fase awal, dimana relasi pemimpin dengan masyarakat masih cenderung bersifat tradisional yang menjunjung nilai ketokohan, model kepemimpinan demikian dapat disebut sebagai *konservatif-involutif* dimana sosok kepala desa hanya bekerja apa adanya (*taken for granted*), menikmati kekuasaan yang dominatif dan yang paling ditekankan adalah tidak berupaya melakukan perubahan. Perubahan desain kelembagaan pemilihan yang

sempat terjadi pada periode-periode berikutnya tidak menjamin kondisi lebih baik, kepemimpinan Desa Gondowangi justru mengalami krisis. Pengalaman sengkabut pengelolaan pada periode awal 2000 an menunjukkan kondisi desa yang sempat dipimpin oleh model *regresif* dimana kepemimpinannya menimbulkan sejumlah hal yang problematis yang tidak menghendaki partisipasi dan cenderung anti terhadap perubahan. Fase terakhir barulah terdapat kepemimpinan baru yang berkarakter *inovatif-progresif* di Desa Gondowangi yang ditandai dengan memberikan kesadaran baru terhadap masyarakat, memberikan nilai-nilai baru terhadap perubahan dan yang terpenting mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Dengan demikian, pengalaman Desa Gondowangi menunjukkan bila kehadiran pemimpin dengan karakter *inovatif-progresif* menjadi salah satu prasyarat utama untuk menciptakan pra kondisi terhadap pembangunan desa yang ideal. Pemimpin yang dapat berkomitmen membenahi pelayanan publik, mengelola kebijakan secara demokratis dan mampu membangkitkan emansipasi lokal dalam pembangunan desa menjadi fondasi penting dalam membangun kelembagaan desa, termasuk dalam hal ini terkait BUM Desa.

Mengakumulasi Pengetahuan Warga Sebagai Basis Inovasi BUM Desa

Bagian ini kemudian akan mengelaborasi lebih jauh bentuk konkrit kepemimpinan inovatif progresif yang ditunjukkan oleh pemimpin desa dengan mempraktikkan pemanfaatan *lebenswelt* yang dimiliki oleh warga. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, konsep *lebenswelt* (dunia kehidupan) secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu pengetahuan yang terdapat dalam suatu tindakan komunikatif. *Lebenswelt* atau dunia kehidupan juga dipahami sebagai jaringan kerjasama-kerjasama yang dimungkinkan lewat komunikasi (Noor, 2012, p. 72). Kerjasama-kerjasama ini inilah yang memungkinkan integritas dan stabilitas sebuah masyarakat. Melalui hal itu, dalam penjelasan bagian ini menguraikan bagaimana akumulasi terhadap *lebenswelt* tersebut dipraktikkan dalam proses pembangunan desa Gondowangi. Sebagaimana Habermas (2007) menjelaskan bila *Lebenswelt* sangat erat kaitanya dengan struktur dan sistem sosial yang berada dalam masyarakat itu sendiri. Adapun yang dimaksud struktur *lebenswelt* adalah latar

belakang pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan segala aspek yang meliputi potensi desa berikut persoalan yang dihadapinya.

Pemanfaatan *lebenswelt* oleh kepala desa Gondowangi berawal dari kesadaran antara pihak pemerintah dan warga, bahwa mereka mempunyai potensi yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi lokal. Yaitu kegiatan dalam sektor pertanian dan penguatan nilai-nilai kebudayaan, seperti gugur desa, selamatan hasil panen, serta acara selamatan bagi tokoh utama Gondowangi yang telah meninggal yaitu Mbah Dilem. Salah satu unsur *lebenswelt* dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana warga desa mampu memiliki pengetahuan atas permasalahan yang dihadapi maupun potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hal tersebut. Berkaitan dengan itu, masyarakat Desa Gondowangi mampu mengidentifikasi keduanya sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2.
Pengetahuan Warga terhadap Permasalahan dan Potensi yang dimiliki

Permasalahan	Potensi
Irigasi air pertanian	Sumber air sungai Dem
Harga panen potensi pertanian yang masih rendah	Luas lahan pertanian bagian utara desa
Konsepsi balai desa yang cenderung dianggap kalangan elit	Masyarakat memiliki nilai-nilai gotong royong dan kepedulian
Belum terkoordinasinya organisasi masyarakat dan tepat	Terdapat semangat kolektif yang dimiliki oleh masyarakat

Sumber: diolah penulis dari data primer, 2021.

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa masalah dan potensi yang dimiliki oleh Gondowangi terletak pada sektor pertanian, pemuda, dan budaya masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh kepala desa Gondowangi ialah dengan beberapa tahapan, yaitu: langkah awal yang ia lakukan untuk menyelesaikan masalah utama adalah dengan mengatasi persoalan konsepsi warga yang menganggap bahwa balai desa adalah milik pemerintah desa. Sehingga ia mencari cara bagaimana agar keberadaan balai desa merupakan wadah masyarakat untuk mengembangkan secara bersama-sama. Dalam hal ini, seiring menggelorakan wacana “Desa Adalah Leluhur yang Perlu Dijaga Bersama” kepala desa melakukan pendekatan *face to face* terhadap warga dan meningkatkan pelayanan publik dengan tidak mengenal waktu

dan tempat. Di tahun pertama kepemimpinannya, kades melakukan kunjungan kesetiap rumah warga dan membawa stempel jika ada warga yang membutuhkannya. Akhirnya cara ini diterima oleh warga, secara pelan-pelan kemudian warga sudah mulai aktif mengunjungi balai desa dan menerima kehadiran kepala desa yang baru.

Langkah kedua ialah menyelesaikan masalah terkait dengan penguatan kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat seperti petani, pemuda karang taruna, pengangguran, dan kelompok keagamaan. Strategi yang diterapkan oleh kades Gondowangi adalah dengan cara memaksimalkan Omah Budaya dan Konsep Balai Ekonomi Rakyat (Balera). Pihak desa dan aparat desa memberikan kepercayaan kepada kelompok pemuda (karang taruna dan agama), caranya adalah pihak desa memberikan amanah dan posisi kepada pemuda sebagai panitia utama. Para kelompok pemuda yang diberikan peluang, mereka langsung berinisiasi untuk mengeluarkan inovasi-inovasinya untuk mengembangkan potensi lokal. Kades memberikan kelonggaran kepada panitia, namun dengan syarat tidak terlepas dari konsep besar terkait dengan “wisata budaya dan agro” melalui penguatan kelompok tani dan memunculkan seni-seni lokal.

Konsep wisata budaya yang diterapkan adalah dengan cara memeriahkan acara selamatan desa dengan mengaktraskan nilai tradisional terkait dengan selamatan desa “babat alas”, kemudian disusulkan dengan rangkaian gugur desa, nonton bareng dengan warga terkait dengan film-film budaya, serta atraksi seni musik yang dilakoni oleh pemuda-pemuda Gondowangi. Diluar kegiatan tersebut, kepala desa menerapkan nilai-nilai kepada pemuda dan warga, agar setiap ada kegiatan keagamaan seperti tahlilan, waisyak, idul fitri, dan hari besar lainnya semua warga harus berpartisipasi.

Selain itu, kepala desa juga melihat adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dalam menangani masalah lain, seperti persoalan sampah di desa. Dalam hal ini, kepala desa menggunakan strategi merekrut pemuda-pemuda yang tidak bekerja untuk memanfaatkan pengelolaan sampah. Pemuda yang menganggur pada umumnya mereka yang sering nongkrong dijalan, alasan kades memilih pemuda tersebut ialah mencari pemuda yang mau bekerja dan tidak malu, apapun

pekerjaannya yang penting terbangun komitmen dan kerjasama antar pemuda dan warga. Capaian yang dibangun oleh pemuda tersebut berupa pengelolaan sampah yang dimasukkan dalam BUM-Des, dimana jangkauannya saat ini sudah mampu memiliki nasabah/pengguna sejumlah 600 KK. Tidak hanya itu, dalam kurun waktu tiga tahun berlangsung program ini juga memberikan kemajuan bagi BUM Desa terutama terkait dampak ekonomi dimana mereka berhasil mengumpulkan keuntungan yang dapat dibagi secara adil ketika momen tertentu seperti misalnya menjelang Hari Raya. Dampak secara luas juga dirasakan masyarakat desa yang berkaitan dengan kebersihan kampung dan irigasi sawah. Warga merasa banyak terbantu dengan adanya pengelolaan sampah yang bisa menjadikan irigasi dan kebersihan kampung bisa lebih terawasi. Secara tidak langsung, keberlanjutan kegiatan ini juga telah memberikan peluang kerja bagi pemuda pengelola sampah, mereka semakin akrab dan diterima oleh masyarakat tidak seperti di awal yang cenderung dianggap pengganggu ketentraman.

Strategi kepala desa yang mengidentifikasi persoalan desa berdasarkan pengetahuan warga dan memberikan solusi sesuai persoalan yang dihadapi itu juga terlihat dalam isu mengenai prolem persawahan dimana para petani mampu mendirikan Lumbung Desa yang mengatur harga khusus tengkulak dan pasar. Pada pertengahan tahun 2019, desa Gondowangi mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa sebesar 1,3 Miliar untuk menguatkan pola kelembagaan pertanian yang sudah dibuat, bahkan rencana fisiknya pemerintah gondowangi akan membuat pipa saluran air berdiameter 5 Meter. Terdapat pula rencana fisik yang akan dilakukan oleh pemerintah Gondowangi ialah jaringan pipa yang akan dibuat akan mengairi persawahan bagian utara dan selatan. Sehingga mampu menghidupkan kembali kawasan persawahan bagian selatan yang cenderung tidak produktif karena kekurangan air. Sedangkan persawahan bagian utara tinggal menguatkan tatakelola pembagian air oleh kelompok tani sekitar. Saat ini, pemerintah Gondowangi hanya menunggu pencairan dari Kementerian Desa untuk merealisasikan program yang telah direncanakan tersebut.

Demikian, penjabaran di atas menunjukkan sejumlah hal penting dalam proses peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa, seperti BUM Desa, sebagaimana

yang ditunjukkan pengalam Desa Gondowangi. Beberapa hal tersebut ialah, pertama bahwa upaya perubahan sosial masyarakat desa untuk menciptakan sekaligus memperkuat kelembagaan BUM Desa dirasa akan lebih efektif dengan memperhatikan karakter kepemimpinan lokal. Hal ini dimaksudkan memberi penekanan bagaimana pola kepemimpinan yang diberikan dapat memberikan peluang dan kesempatan pada masyarakat khususnya bagi pemuda maupun petani. Dengan kemampuan mengakumulasi pengetahuan masyarakat secara langsung terkait permasalahan maupun potensi yang dimiliki, secara tidak langsung pemimpin tidak terkesan memberikan perubahan secara *top down* atau program yang semata bersumber dari pemerintah desa. pola demikian akan membantu mengurai batas-batas antara pemerintah desa dengan warga yang biasa menjadi hambatan dalam mengupayakan pembangunan desa.

Kedua, berkaitan dengan upaya menumbuhkan tanggungjawab sosial terhadap potensi yang dimiliki. Hal ini menekankan tentang kapasitas pemerintah desa dalam memunculkan kesadaran lalu mendorong masyarakat dalam mengambil peran atau tanggungjawab dalam mengelola potensi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. proses ini mengandaikan bila masyarakat dapat merumuskan secara kolektif upaya-upaya dalam menagani persoalan yang dihadapi. Tidak berhenti disitu, masyarakat juga dituntut merencanakan langkah-langkh strategis sesuai dengan kesempatan kolektif yang mereka tentukan sebelumnya. Ini mengasumsikan bila pembangunan dapat dilaksanakan secara *bottom up* tanpa adanya intervensi yang banyak dari pemerintah desa. Hal ini menggambarkan bila kunci utama dalam pembangunan desa, sebagaimana di Desa Gondowongi bukan pada program besar, tapi pendekatan yang digunakan. Ketiga, terkait penanaman nilai pembangunan tidak dilakukan langsung oleh pemerintah desa, melainkan dilakukan oleh kader-kader pilihan yang dianggap berkompeten untuk mensosialisasi secara *soft* dan *bottom up*. Dengan begitu, ukuran tercapainya perubahan di masyarakat ialah berlangsungnya hubungan timbal-balik dalam sektor ekonomi dan sosial. Sehingga warga sebagai pelaku juga sebagai sasaran untuk merasakan hasil demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Menggagas BUM Desa yang Berkelanjutan

Bekerjanya aspek *lebenswelt* juga tercermin melalui beberapa wujud program BUM Desa, hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintahan desa berhasil memainkan peran untuk membangun kesepakatan yang didasari oleh kondisi-kondisi riil atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa maupun wacana yang berkembang di masyarakat gondowangi seperti persoalan penurunan volume debit air, sampah, pertanian maupun UMKM. Dalam hal ini, keberhasilan sejumlah program tersebut tidak semata digali atas pengetahuan warga terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi, namun juga inovasi yang berasal dari pengalaman pemimpin atau dalam hal ini kepala desa yang kemudian dikembangkan di desa tersebut. Sebagaimana keterlibatannya dalam Balai Kampung Nuswantara (BKN) yang menjadi agenda dari Asosiasi kepala desa di Indonesia, kepala desa kemudian menerapkan pola yang sama untuk Desa Gondowangi. Penerapan pola tersebut berupa strategi memunculkan ide dan menyusupkan ide kepada masyarakat. Hal yang menarik disini ialah bagaimana sebenarnya kepala desa bisa menumbuhkan keterlibatan pemuda, warga, dan tokoh masyarakat. Meskipun ide tersebut berasal dari kades, namun kenyataannya seakan-akan dimulai oleh warga sendiri. Cara yang dilakukan ialah dengan menggerakkan perangkat desa yang lainnya, melakukan pendekatan dan mengajak kerja bersama dengan warga setempat. Penyusupan ide-ide terhadap warga diibaratkan pemberian stimulus, kemudian direspon oleh warga dan dikaji bersama untuk menjalankan programnya (Slamet, wawancara pribadi 2021). Adapun hal itu dilakukan dengan tujuan mendorong kelancaran kegiatan BUM Desa.

Adapun terdapat beberapa kegiatan yang berada pada ruang lingkup penyelenggaraan BUM Desa Gondowangi. Beberapa kegiatan ini didesain untuk memastikan keberlanjutan BUM Desa dan terutama bagi kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana berikut;

a. Balai Ekonomi Rakyat (BALERA)

BUM Desa BALERA merupakan kegiatan yang mengarah pada unit usaha rakyat atau kewirausahaan. Tujuannya adalah agar bisa mewadahi segala bentuk produksi yang dimiliki oleh warga, misalkan mulai dari jenis makanan, kuliner, buah-buahan, minuman, dan lain sebagainya. Untuk mencapai target utama, maka anggotanya

berupaya mengembangkan jaringan dan publikasi pemasaran hasil produksi warga sekitar. Mereka juga menawarkan sistem paket, atau disebut dengan kotak menu. Maksudnya adalah para anggota yang berhasil memasarkan dan menarik konsumen, telah menyediakan satu paket jenis makanan ataupun minuman sesuai dengan menu yang dipesan oleh konsumen. Mereka akan langsung menemui para pedagang atau home industri yang mempunyai komoditas sesuai dengan permintaan pasar. Adapun proses pemasaran sejumlah komoditas yang ditawarkan dilakukan dengan memanfaatkan internet, melalui platform media sosial seperti instagram, whatsapp, line, hingga blog. Hal ini menandakan bila penetrasi e-commerce dalam mendukung peningkatan ekonomi desa, seperti program *One Village One Product (OVOP)* juga telah dilakukan. sebagaimana diketahui bila penggunaan teknologi atau pemanfaatan internet untuk mendukung peningkatan ekonomi desa merupakan sesuatu yang sangat penting pada era ini (Purnama, 2018).

BALERA juga mempunyai kegiatan kesenian dan kebudayaan yang berusaha untuk mewadahi potensi bagi anak kecil ataupun usia remaja. Mereka bekerjasama dengan beberapa kampus ternama seperti Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas swasta lainnya. Kegiatan pengabdian masyarakat dan KKN menjadi faktor pendorong berlangsungnya kegiatan kebudayaan setempat. BALERA sebagai wadah penggerak pemuda yang ahli dalam bidang kesenian dan kebudayaan loka. Pemuda menjadi penggeraknya, ide-ide dan pelaku praktis acaranya dilakukan oleh kalangan pemuda. Berlangsungnya BALERA saat ini menjadi ruang publik bagi pemuda dan remaja, keterlibatan mereka tidak hanya ada pada sesi acara saja. Ide ataupun diskusi yang berlangsung diantara mereka membantu kegiatan BUM Desa menemukan cara-cara pendekatan yang baru. Seperti dibukanya ruang cangkru'an bagi pemuda, secara langsung telah mengaktifkan kegiatan –kegiatan diskusi sekaligus membuka iklim yang mendukung adanya usaha-usah kecil dari masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal ini, terlihat bila selain memastikan solidaritas antara warga tetap terjaga, upaya yang bersifat penetrasi teknokratis dengan melibatkan pemanfaatan teknologi dan pelibatan pihak eksternal seperti perguruan tinggi juga menjadi satu stimulus yang determinan untuk memastikan keberlanjutan BUM Desa.

B. Penggunaan Air Minum Desa (PAMdes)

Sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan di awal, bahwa persoalan air tidak hanya saja terjadi dalam sektor pertanian saja, melainkan pada sektor kebutuhan domestik rumah tangga. Kegiatan pengelolaan air ini bermula sejak tahun 2004, atas gerakan swadaya masyarakat jaringan air pun bisa terealisasi, meskipun pada waktu itu hanya beberapa KK yang menggunakan. Tidak tersedianya alat pengukur penggunaan air (master meter) mempersulit hitungan beban setiap bulannya, sehingga pada masa itu seluruh konsumen pembayarannya disamaratakan secara keseluruhan. Masalah yang terjadi ketika tidak menggunakan alat pengukuran volume air ialah masyarakat tidak bisa mengontrol, warga secara bebas menggunakan air semaunya mereka. Sehingga volume air yang tersedia tidak bisa mencukupinya, banyak keluhan dari konsumen/pelanggan bahwa jaringan air yang mereka pakai tidak sekencah di awal pemakaian. Hal ini bertambah pelik mengingat semakin bertambahnya penduduk Desa Gondowangi akan mempersempit ruang-ruang desa, khususnya penggunaan lahan warga. Pola pemukiman warga pada awalnya mempunyai halaman dan terpencar-pencara, saat ini tidak lagi demikian. Jarak rumah satu dengan yang lainnya berdempetan atau sekitar 1-2 meter, hal ini mengakibatkan penurunan volume air sumur yang mereka gunakan. Persoalan air kemudian tidak hanya berkaitan dengan urusan pertanian semata, tapi juga domestik.

Penjelasan disini berkaitan tentang bagaimana pengelolaan persoalan air dapat diintegrasikan dengan unit usaha BUM Desa, yang secara tidak langsung selain memberikan solusi terhadap permasalahan warga juga memberi penguatan terhadap kelembagaan ekonomi secara berkelanjutan. Langkah pertama yang dilakukan adalah penambahan infrastruktur yang berfungsi memperbesar bukan saja daya tampung air, namun jangkauannya kepada masyarakat desa. Namun yang lebih penting, adanya perubahan sistem pembiayaan untuk kalangan yang memanfaatkan sumber daya air tersebut. Hal itu pertama-pertama dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Ini dilakukan dengan wujud pengiriman beberapa pengurus PAM des untuk melakukan pelatihan manajemen air di Jakarta dan Surabaya. Dengan hal tersebut, harapannya dapat meningkatkan

kapasitas anggota dan memberikan ide-ide baru terkait alternatif solusi masalah yang sering terjadi. Berdasarkan hal itu terdapat perubahan pengelolaan yang dirasakan seperti sistem pembiayaan yang telah menggunakan *online*, terbentuknya peta jaringan air yang mempermudah mengantisipasi kebocoran dan sistem yang idel untuk menjaga kualitas layanan.

Tim pengurus PAMDes mengeluarkan aturan terkait besarnya harga perkubik air, yaitu khusus keluarga, swasta dan sosial. Bagi pengguna dari kalangan keluarga besaran air perkubik Rp.500 (lima ratus rupiah), sedangkan bagi kalangan swasta seperti kegiatan home industri, perusahaan, perkantoran, dan lainnya sebesar Rp.1000 (seribu rupiah). Bagi tempat-tempat peribadatan seperti mushola, mesjid, gereja, dan pura tidak dikenakan biaya pengguna air. Hal ini telah disepakati bersama dalam kegiatan rapat antara pengurus PAMDes dan warga pengguna air minum. Saat ini jumlah pengguna air sebanyak 1036 KK (seribu tiga puluh enam) yang tersebar di empat dusun yaitu; Dusun Gedangan, Dusun Rekesan, Dusun Wiloso, dan Dusun Pohbener.

Pelaksanaan kegiatan PAM-Des Gondowangi yang berlangsung saat ini, berada pada tingkat klaim kebenaran dan ketepatan. Hal ini dapat diukur bagaimana sebenarnya tim PAM-Des dan Pemerintah desa saling berkolaborasi untuk menjaga kebutuhan yang paling tepat dan menertibkan sikap warga agar dapat mengikuti aturan atau norma-norma yang telah disepakati bersama. Misalkan besaran harga air permeter sebesar Rp. 500 rupiah, dan adanya denda jika terlambat membayar bulanan air. Pelayanan yang sigap dan tanggap menjadi prinsip tim PAM-Des, mereka langsung merespon secara cepat jika terjadi kendala-kendala kebocoran pipa, pemasangan pipa, dan complain dari warga jika tidak sesuai antara debit dan pemakaian sehari-hari.

C. Pengelolaan Sampah

Pada awal pembuatan program pengelolaan sampah melalui beberapa proses yaitu; musyawarah dengan RT, Kasun, dan perwakilan Keluarga. Musyawarah ini bertujuan mendapatkan dukungan ataupun legitimasi dari tokoh masyarakat, mengidentifikasi titik/kawasan yang sering mengalami permasalahan sampah, dan sebagai proses sosialisasi akan diadakannya kegiatan pengelolaan sampah. Pada

tahap awal tidak semuanya mendukung adanya kegiatan tersebut, terutama dari pemerintah desa yang lama. Mereka menganggapnya bahwa yang dilakukan oleh Karang Taruna suatu hal tidak mungkin dan kurang kerjaan, sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah desa belum pernah diberikan. Akhirnya untuk mengatasi respon tersebut, ketua karang taruna memasukkan proposal di beberapa lembaga pemerintah kabupaten, seperti lingkungan hidup, DPRD, dan organisasi sosial lainnya. Pihak karang taruna juga memanfaatkan dana swadaya masyarakat, anggaran yang terkumpul digunakan menyewa lahan.

Selanjutnya karang taruna tetap merealisasikan kegiatan tersebut, meskipun pada waktu itu banyak kendalanya. Jumlah peminat atau konsumen sebanyak 50 KK yang berada di Dusun Rekesan. Mereka setuju besarnya nominal perbulannya sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dalam satu bulan. Proses pembuatan besarnya jumlah penarikan, penarikan sampah di setiap rumah, dan lainnya diperoleh dari hasil musyawarah antara karang taruna dan perwakilan RT, Dusun, dan warga. Sesuai dengan kesepakatan, karang taruna juga membentuk tim pengelola sampah. Di awal operasional program, aktivitas tim pengelola sampah setiap hari harus mendatangi ke rumah warga untuk mengambil tong sampah, kemudian di tumpuk dan di bakar. Belum ada proses pemilahan organik dan anorganik, tim pengelolah menargetkan hanya menjaga kebersihan sampah tingkat rumah tangga dan irigasi air. Hasil iuran bulanan dari konsumen dibagikan untuk upah tim pengelolah, sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu bulannya (Nomo, wawancara pribadi, 2021).

Kegiatan ini kemudian dijadikan salah-satu BUM Desa Gondowangi, untuk meningkatkan kapasitas anggota, tim pengelola dilibatkan dalam pelatihan pengelolaan sampah dengan tujuan agar sampah yang terkumpul tidak lagi dibakar, melainkan dipilah dan dijual kembali ke pengepul sampah. Jumlah konsumen yang bertambah dan nominal pembayaran yang mencapai Rp. 8000 rupiah/KK tentunya akan merubah besarnya upah yang mereka terima, saat ini mereka mendapatkan upah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah). Seluruh hasil iuran sampah dikelola secara mandiri oleh tim, (75% dialokasikan untuk gaji dan 25% untuk perawatan dan penambahan fasilitas). Perkembangan saat ini tim pengelolah sampah telah

mempunyai jaringan dengan pengepul, selesai mereka mengumpulkan sampah kemudian dipilah dan dijual ke pengepul. Hasilnya tetap dikumpulkan di kelompok, selanjutnya akan dibagi-bagi sebagai bentuk penghasilan tambahan dan kas kelompok. Pada saat lebaran, tim pengelola juga mendapatkan THR dan gaji ke-13 selayaknya pegawai negeri. Hasil kas kelompok juga dibuat untuk kegiatan simpan-pinjam, tujuannya agar bisa merangsang kegiatan ekonomi mikro bagi anggota dan warga sekitarnya. Pada tahun 2017 tim pengelola sampah mendapat bantuan dari propinsi Jawa timur terkait dengan pengembangan usaha dan pemenuhan fasilitas pendukung.

Demikian, kegiatan pengelolaan sampah saat ini manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak. Baik oleh produsen maupun masyarakat secara luas, mereka sudah merasakan beberapa dampak akan adanya program tersebut. Yaitu kebersihan halaman lingkungan rumah bisa terjaga dan tidak mengganggu aliran irigasi air sawah, perilaku warga tidak lagi membuang sampah sembarangan, mereka telah terbiasa membuat sampah rumah tangga disekitar rumahnya sendiri dan yang terpenting mampu meningkatkan perekonomian desa dengan menyerap sejumlah tenaga kerja dari warga desa.

KESIMPULAN

Di dalam konfigurasi wacana mengenai perkembangan BUM Desa yang sebelumnya telah banyak dilakukan oleh para ahli, studi ini setidaknya dapat mengisi penjelasan lain bila upaya pengembangan BUM Desa sangat dimungkinkan dilakukan dengan memanfaatkan basis pengetahuan masyarakat lokal itu sendiri. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa lokalitas yang berasal kesadaran kolektif akan sejarah dan dinamika sosial yang dimiliki masyarakat itu merupakan modal berharga yang sejatinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bila penelitian lain sebelumnya telah banyak didominasi oleh wacana pengembangan BUM Desa melalui penetrasi yang bersifat teknokratis, seperti kebijakan yang inovatif, penguatan kelembagaan masyarakat dan lain sebagainya, maupun semata melihat pengaruh politik yang didasari perilaku elit, hasil penelitian ini setidaknya melengkapi penjelasan lainnya dengan argumen utama bahwa melalui instrumen

yang lebih bersifat sosiologis seperti pengakumulasian pengetahuan kolektif (*lebenswelt*) masyarakat lokal atau yang didasarkan pada suatu tindakan komunikatif itu sendiri sesungguhnya juga dapat berperan penting untuk menghadirkan strategi yang cukup efektif dalam memastikan keberlanjutan BUM Desa.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di desa Gondowangi Kabupaten Malang sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, menunjukkan bila pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau penguatan terhadap BUM Desa dapat dilakukan dengan baik dengan memperhatikan sejumlah hal; *pertama* adalah memperhatikan model kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang *inovatif-progresif* menjadi salah satu prasyarat utama untuk menciptakan pra kondisi terhadap pembangunan desa yang ideal. Melalui kepemimpinan yang demikian, upaya-upaya perubahan dimungkinkan untuk mendapatkan ruang. Bukan hanya itu, kepemimpinan yang demokratis juga memberi peluang dorongan terhadap masyarakat untuk aktif terlibat dalam menyusun agenda pembangunan termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan ekonomi BUM Desa.

Kedua, hadirnya inovasi kelembagaan ekonomi desa atau BUM Desa sangat bergantung tentang kemampuan masyarakat menyadari persoalan dan potensi yang dimilikinya sendiri, untuk itu pemerintah desa diharapkan mampu memberikan stimulus agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu strategis yang dihadapi. Dengan itu, agenda-agenda perumusan rencana strategis untuk pembangunan dan khususnya untuk peningkatan BUM Desa lebih representatif karena mewakili aspirasi warga desa secara langsung, alih-alih secara *top down* dari pemerintah desa. *Ketiga*, selain memetakan potensi yang dimiliki dan membangun basis perubahan berdasarkan hal itu, penguatan kelembagaan ekonomi BUM Desa secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen penting lainnya, seperti penggunaan *e-commerce* yang menunjang industri atau usaha kecil menengah desa, maupun pelibatan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem sosial yang mendukung terhadap pembangunan yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2020). *Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Pati*. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah 18 (2).
- Alaslan, A. (2020). *Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa*. Journal Adbispowe – STIA Saumlaki Vol.1 (1).
- Djunandi, Y. (2020). *Sikap Politik Pemerintah Desa Jatimukti Dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan*. Jurnal Transformative 7(1). DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.4
- Eko, S., & Dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Dokumen Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCES).
- Endrekson, R. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pendamping Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Kota Prabumulih*. Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol 2(2)., 178-201.
- Hardiman, B. (1993). *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jaya, R., & Rafi, M. (2018). *Analisis Hambatan dalam Pengembangan BUM Desa Studi Kampung Rempak Kabupaten Siak*. Jurnal El-Riyasah Vol.9(1).
- Justar, A. (2020). *Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*. Jurnal Ilmiah Pranata Edu Vol 2 (1).
- Kinasih, I. e. (2020). *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian Masyarakat*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 1(1).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, I. (2012). *Identitas Agama, Ruang Publik dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Habermas*. Jurnal Ilmu Ushuluddin Vol 1(1). p.61-87, 72.
- Purnama, I. K. (2018). *Penerapan E-Commerce untuk Penguatan UMKM Berbasis Konsep One Village One Product di Kabupaten Karangasem*. SEWAGATI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM ITS 2(2).

Supriadi, D. (2020). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Ganec Swara Vol.15 (1).

tempo.co. (2019). "Fitra Ungkap Persoalan Dana Desa dan Bumdes Apa Saja". Diakses pada 5 Juli 2021 melalui <https://nasional.tempo.co/read/1286342/fitra-ungkap-persoalan-dana-desa-dan-bumdes-apa-saja>